

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

GAKKUM LHK

PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
WILAYAH SUMATERA

THE AGAINST THE X-CRIME



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SUMATERA**

TAHUN 2023



Subhan,S.Hut, M.Si
Kepala Balai

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan selama Tahun 2023. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum LHK) Wilayah Sumatera berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerjanya melalui dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023. Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen ini menguraikan sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya serta mengukur akuntabilitas kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera melalui indikator kinerja dan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023.

Capain kami selama ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat, lembaga non pemerintah, pemerintah pusat dan daerah serta unit terkait. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama selama ini, kami berharap capain kinerja Tahun 2023 ini dapat menjadi gambaran dan acuan dalam meningkatkan penegakan hukum ke depan.

Akhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja ini dan semoga Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Subhan, S.Hut, M.Si
Nip. 19730320 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

1	BAB I	
	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUGAS DAN FUNGSI	1
	C. STRUKTUR ORGANISASI	3
	D. ISU STRATEGIS	6
2	BAB II	
	PERENCANAAN KINERJA	8
	A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024	8
	B. RENCANA KERJA	11
	C. Perjanjian Kerja	13
3	BAB III	
	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	A. CAPAIAN KINERJA	14
	B. REALISASI ANGGARAN	33
4	BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Sebaran Pegawai Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera 2023
TABEL 1.2	Anggaran Balai Gakkum LHK berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023
TABEL 1.3	Posisi BMN dalam Neraca per 31 Desember 2023
TABEL 2.1	Program dan Indikator Kinerja Program Unit kerja Eselon I Ditjen Gakkum LHK
TABEL 2.2	Target Kinerja Rencana Strategis Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024
TABEL 2.3	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024
TABEL 2.4	Perjanjian Penetapan Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023 (Revisi)
TABEL 3.1	Capaian Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023
TABEL 3.2	Capaian IKK Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen Gakkum LHK
TABEL 3.3	Capaian IKK Pencegahan dan Pengamanan Hutan
TABEL 3.4	Jumlah Operasi di Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Tahun 2023
TABEL 3.5	Lokasi Operasi Pengamanan Hutan, Perusakan Lingkungan hidup & Peredaran Hasil Hutan.
TABEL 3.6	Capaian IKK Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
TABEL 3.7	Jumlah Pengaduan di Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Sumatera Tahun 2023
TABEL 3.8	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sektor Tahun 2023
TABEL 3.9	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2023
TABEL 3.10	Jumlah Pengawasan berdasarkan Sektor Industri/Jenis Usaha
TABEL 3.11	Hasil Pengawasan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023
TABEL 3.12	Capaian IKK Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TABEL 3.13	Jumlah P-21 berdasarkan Tipologi Kasus Tahun 2023
TABEL 3.14	Jumlah P-21 di Wilayah Kerja Balai Gakkum Wilayah Sumatera Tahun 2023
TABEL 3.15	Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera
- GAMBAR 1.2 Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023
- GAMBAR 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK
- GAMBAR 3.1 Operasi pencegahan dan pengamanan hutan tahun 2023 meliputi kejahatan TSL, Penambangan tanpa izin, dan perambahan Kawasan Hutan
- GAMBAR 3.2 Penanganan pengaduan, pengawsan dan sanksi administrasi.
- GAMBAR 3.3 Kasus penegakan hukum pidana LHK sampai P21.

DAFTAR GRAFIK

- GRAFIK 1.1 Sebaran Pegawai Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023
- GRAFIK 1.2 Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023
- GRAFIK 3.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Tipologi Tahun 2023
- GRAFIK 3.2 Sebaran Operasi di Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Tahun 2023
- GRAFIK 3.3 Jumlah Pengaduan Tahun 2023
- GRAFIK 3.4 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2023
- GRAFIK 3.5 Jumlah Pengawasan Tahun 2023
- GRAFIK 3.6 Hasil Pengawasan Terhadap 189 Perusahaan Tahun 2023
- GRAFIK 3.7 Hasil Pengawasan Berdasarkan Provinsi Tahun 2023
- GRAFIK 3.8 Sebaran P-21 Berdasarkan Provinsi 2023
- GRAFIK 3.9 Capaian (%) Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023
- GRAFIK 3.10 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan selama tahun 2023, Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerjanya melalui dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 ini. Dokumen ini menguraikan sejauh mana pencapaian program dan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Laporan ini juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan penyempurnaan berbagai kebijakan pada periode yang akan datang.

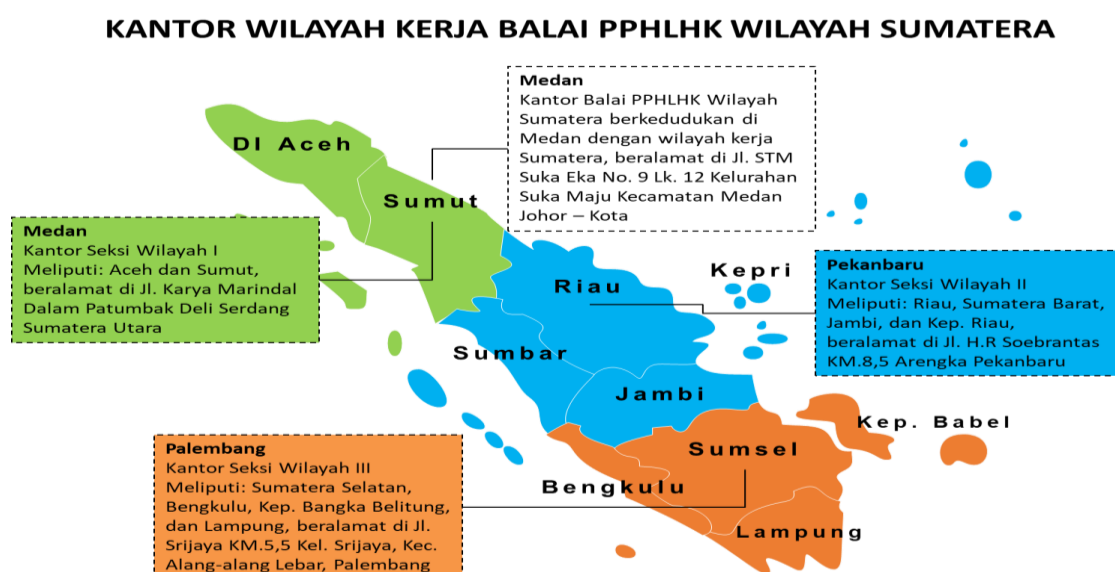
B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.13/Menlhk/Setjen/OTL.1/7/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera memiliki tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
4. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;

5. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
6. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
9. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera adalah jabatan Eselon III-a yang disebut Kepala Balai dan jabatan Eselon IV-a yang disebut Kepala Subbagian berkedudukan di Medan sedangkan jabatan Eselon IV-a yang disebut Kepala Seksi berkedudukan pada 3 (tiga) wilayah kerja yakni: Seksi Wilayah I meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara. Seksi Wilayah II meliputi provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat. Seksi Wilayah III meliputi provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Peta Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera dijelaskan pada Gambar 1. Sebagai berikut:



GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.13/Menlhk/Setjen/OTL.1/7/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.



Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2022, Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera didukung oleh 245 orang ASN yang terdiri dari 211 orang PNS, 4 Orang PPPK dan 30 orang pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). PNS tersebut meliputi 5Pejabat Struktural, 15 Fungsional Umum, 30 PPLH, 2 PPBJ, 155 Polhut,, 4 Pranata Keuangan APBN, 4 Arsiparis. Kebutuhan SDM masih kurang apabila dibandingkan dengan beban kerja setiap tahunnya yang tersedia pada Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera. Pemetaan jabatan sesuai keahlian atau kompetensi sangat diperlukan sehingga setiap pegawai dapat bekerja optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Terakhir, kebutuhan terkait pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai masih sangat kurang, mengingat tuntutan pekerjaan yang sangat dinamis bagi pejabat fungsional umum, pejabat fungsional dan pegawai PPNPN. Sebaran di setiap seksi wilayah tergambar dalam tabel 1.1.

TABEL 1.1 Sebaran Pegawai Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023

No	Wilayah Kerja	Pejabat Struktural		Fungsional Umum		PPLH		Polhut		PPBJ		Pranata Keuangan APBN		Arsiparis		Tenaga Kontrak		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Kantor Balai	2	-	7	2	1	4	4	4	1	1	-	2	-	2	5	4	38
2	Seksi Wilayah I	1	-	2	-	3	2	31	-	-	-	-	-	-	-	4	2	45
3	Seksi Wilayah II Pekanbaru	1	-	2	-	3	5	40	3	-	-	-	-	-	2	6	1	67
4	Seksi Wilayah II Mako Jambi	0	-	2	-	1	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34
5	Seksi Wilayah III	1	-	-	-	2	5	39	4	-	-	1	1	-	-	7	-	60
Total		5	0	13	2	14	16	144	11	1	1	1	3	0	4	22	8	245



GRAFIK 1.1 Sebaran Pegawai Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023

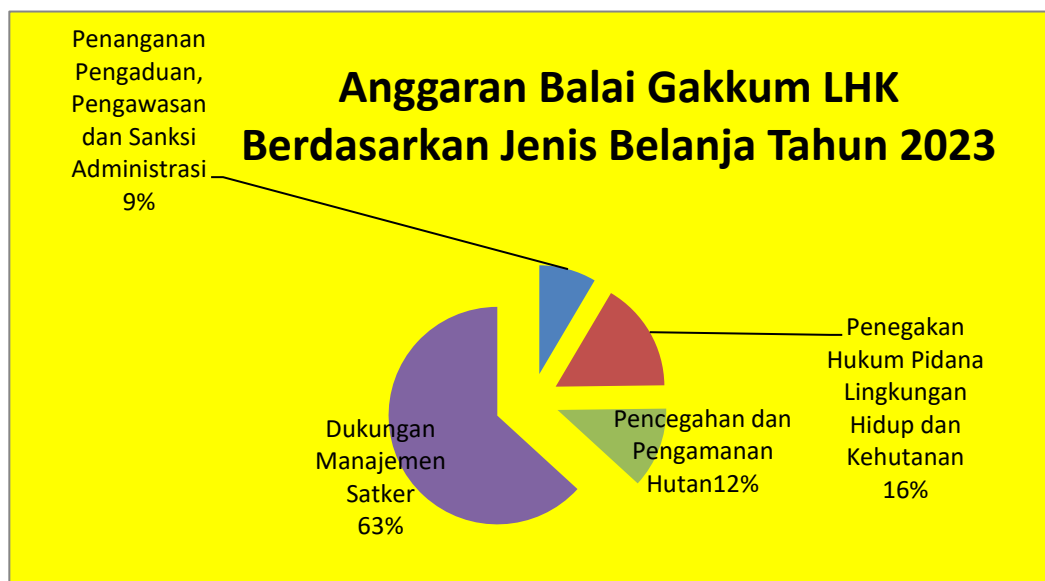
Penataan jabatan fungsional umum menjadi fungsional tertentu berdampak terhadap pemetaan jabatan fungsional dan peningkatan kompetensi jabatan fungsional Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera. Jabatan fungsional yang paling banyak diminati adalah jabatan fungsional Polhut, Arsiparis, dan PPLH. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut diperlukan pelatihan dasar dan tingkat lanjutan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera dengan baik. Dengan meningkatnya kebutuhan kompetensi maka diperlukan tambahan anggaran dana kedepannya untuk mengakomodir pelatihan para calon jabatan fungsional Polhut, Arsiparis, dan PPLH.

Sumber Daya Anggaran

Pada awal tahun 2023, Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera memperoleh anggaran sebesar Rp 60.491.084.000,-. Dengan komposisi: Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebesar Rp 5.137.120.000 atau 8,5%, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 9.835.700.000 atau 16,3%, dan Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebesar Rp 7.289.964.000 atau 12%, Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp 38.228.300.000 atau 63,2% yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

TABEL 1.2 Anggaran Balai Gakkum LHK berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Persentase (%)
1	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	5.137.120.000	8,5
2	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.835.700.000	16,3
3	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	7.289.964.000	12
4	Dukungan Manajemen Satker	38.228.300.000	63,2
Total		60.491.084.000	100



GRAFIK 1.2 Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023

Pagu anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera mengalami peningkatan seiring jumlah beban kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Serapan anggaran yang paling banyak berada pada pembayaran gaji pegawai Balai Gakkum Wilayah Sumatera. Jenis kegiatan teknis Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera masih sangat kurang dikarenakan jumlah pengaduan dan pengawasan usaha kegiatan dan jumlah penanganan kasus kehutanan dan lingkungan hidup yang terus meningkat sehingga diperlukan tindak lanjut dari pimpinan tinggi terhadap alokasi pagu anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera kedepannya.

Sarana dan Prasarana

Posisi BMN Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera dalam neraca per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 1.3 Posisi BMN dalam Neraca per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai (Rupiah)
1.	Tanah	4.249.100.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	28.796.330.666,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.632.727.755,00
4.	Irigasi	1.270.322.400,00
5.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	491.654.750,00

Aset tersebut merupakan hasil mutasi tambah yang terdiri dari pengadaan/pembelian DIPA Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera tahun 2017 dan transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera memiliki banyak faktor-faktor yang dapat menjadi potensial dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal yakni sebagai berikut:

1. Internal

- Kualitas sarana dan prasarana pendukung dan teknologi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera perlu dilakukan peningkatan;
- Pagu anggaran membatasi pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera;
- Beban pekerjaan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera setiap tahunnya meningkat;
- Dimandatkannya 7 Undang-Undang terkait lingkungan hidup dan kehutanan untuk melaksanakan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- Belum optimalnya pemetaan kompetensi SDM untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera
- Belum adanya peningkatan kompetensi SDM yang terencana dalam 5 tahun ke depan sehingga memenuhi beban tugas dan fungsi untuk penempatan/penugasan, kebutuhan training serta penambahan rekrutmen SDM;
- Tidak semua undang-undang yang dimandatkan kepada Ditjen Gakkum LHK dikuasai oleh PPNS lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera (contoh: Undang-undang Konservasi Tanah dan Air serta undang-undang Pengelolaan Sampah);
- Belum optimalnya dukungan para pihak seperti aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan kualitas Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkungan masyarakat dan publik;
- Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dari segi sumber daya manusia belum memadai baik dari segi kuantitas dan kualitasnya untuk menghadapi tantangan bidang LHK yang terus meningkat setiap tahunnya; dan
- Belum terlaksananya pengelolaan eco-office.

2. Eksternal

- Pembangunan pola kerjasama yang baik kepada seluruh bagian untuk memudahkan penyelesaian tugas;
- Pelibatan multistakeholder seperti internal eselon teknis KLHK, pemerintah daerah dan akademisi secara partisipatif dalam penanganan kasus di daerah;
- Peningkatan pola kerja kolaboratif dengan para pihak Aparat Penegak Hukum Lainnya untuk penanganan kasus;
- Masih adanya beban terkait penanganan gugatan hukum yang belum dapat ditangani secara mandiri;
- Peningkatan penegakan hukum melalui pendekatan multidoor masih terkendala oleh kapasitas operasionalnya;
- Pelaksanaan kegiatan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terkendala kebutuhan lain pada pihak eksternal; dan
- Dukungan pihak eksternal yang masih belum merata pada seluruh wilayah kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Klhk

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (selanjutnya disingkat menjadi RPJMN 2020-2024) telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Oleh karena seluruh aktivitas pembangunan diarahkan untuk memenuhi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024, maka visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat menjadi KLHK) adalah sama dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, demikian pulalahnya dengan seluruh unit kerja di bawah KLHK, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat menjadi Ditjen Gakkum LHK).

Untuk memenuhi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, maka KLHK memiliki visi yaitu “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang inovatif dan berdaya saing dengan berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan” dan misi antara lain:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing; dan
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Dari misi KLHK tersebut di atas kemudian diturunkan menjadi beberapa sasaran straregis. Sasaran strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

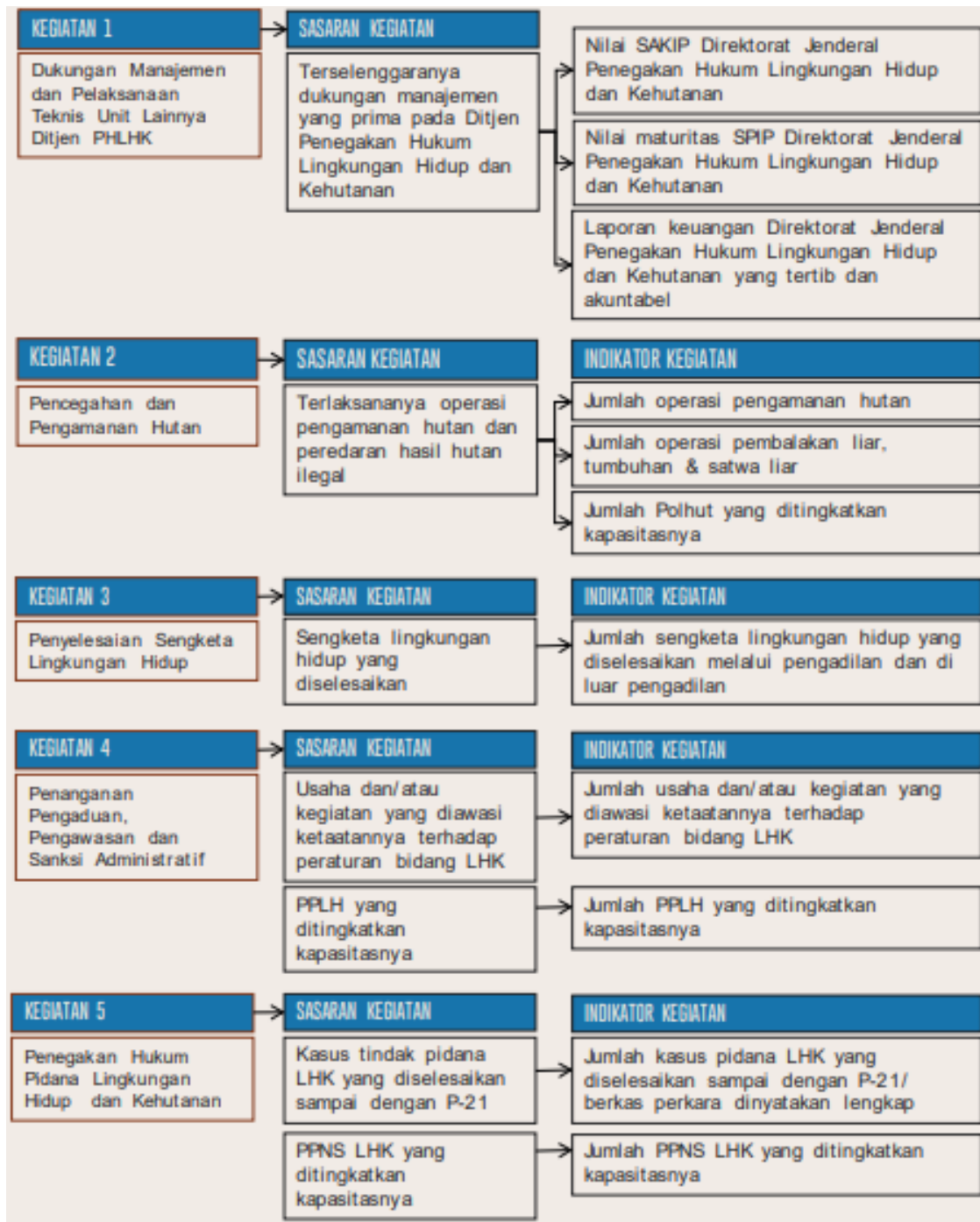
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) yang dilaksanakan oleh Ditjen Gakkum LHK diturunkan dari Sasaran Strategis KLHK nomor 4, yaitu Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing dan Indikator Kinerja Utama nomor 14, yaitu Penyelesaian kasus bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

TABEL 2.1 Program dan Indikator Kinerja Program Unit kerja Eselon I Ditjen Gakkum LHK

Program	Sasaran Program	Indikator Program
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.	Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK.
	Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman.	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman.
	Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Jumlah kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Unit Kerja Eselon II dan UPT

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera merupakan perpanjangan tangan dari Unit Kerja Eselon II Ditjen Gakkum LHK di daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera merupakan kegiatan dari Unit Kerja Eselon II Ditjen Gakkum LHK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera sesuai dengan gambar berikut:



*Sumber: Renstra Ditjen Gakkum 2020 – 2024

GAMBAR 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK

B. RENCANA KERJA

Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 yang menjadi dasar Perubahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 melalui Permen LHK Nomor: P.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/1/2022, hal tersebut yang menjadi amanat Rencana Strategis Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 melalui Permen LHK Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2022 yang diturunkan menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran strategis Jangka Menengah Dan Jangka Panjang. Rencana kerja ini juga menjadi acuan menetapkan Indikator Penilaian Kinerja sebagai instrument mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Untuk Rencana Strategis Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera 2020-2024, target kinerja yang direncanakan untuk kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2 Target Kinerja Rencana Strategis Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Target Rencana Strategis				
			2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen Gakkum LHK	Layanan dukungan manajemen UPT	Layanan	1	1	1	1	1
	Layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	Hektar (ribu)	400	535	500	550	500
	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan	Operasi	19	24	26	30	35
	Jumlah operasi peredaran hasil hutan	Operasi	27	40	48	54	69
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Personil	0	161	165	168	172
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Penanganan Pengaduan Perusahaan	Pengaduan	74	111	125	144	155
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Pengaduan	168	265	315	379	429
	Pengawasan Bidang LHK	Perusahaan	90	135	153	175	189
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus	46	76	85	93	104
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	5	5	8	8

Kerangka Pendanaan

Untuk Rencana Strategis Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera 2020-2024, kerangka pendanaan yang direncanakan untuk kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Balai Gakkum Wilayah Sumatera Tahun 2020-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen Gakkum LHK*	Layanan dukungan manajemen UPT	-	-	-	-	-
	Layanan perkantoran	-	-	-	-	-
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan					
	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan	17.955.000	24.203.000	27.553.000	33.059.000	34.750.000
	Jumlah operasi peredaran hasil hutan	13.890.000	20.974.000	25.262.000	28.344.000	40.638.000
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	-	400.000	450.000	500.000	500.000
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Penanganan Pengaduan Perusahaan	2.319.358.537	4.136.038.385	5.044.350.093	6.096.743.183	6.976.706.725
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	1.708.300.000	3.052.415.508	3.743.005.817	4.497.657.713	5.154.934.441
	Pengawasan Bidang LHK	4.130.640.000	7.371.775.636	9.048.225.103	10.858.009.476	12.466.867.153
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	14.895.628.000	29.120.543.000	35.536.700.000	44.136.804.000	57.537.845.000
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	1.295.272.000	2.532.221.000	3.090.148.000	3.838.157.000	5.003.291.000
		-	-	-	-	-

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam Permenpan Nomor. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen tersebut untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Ditjen Gakkum LHK dan Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera telah menandatangani Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Revisi Target 2023
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	11 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	4 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang
2	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	1 Perkara
3	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	180 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang
4	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	37 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen Gakkum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
		Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit

TABEL 2.4 Perjanjian Penetapan Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023 (Revisi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Acara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Akuntabilitas ini juga menjelaskan perbandingan antara target dan capaian seluruh indikator yang diukur. Selain perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2023, juga dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Akuntabilitas Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera merupakan perwujudan kewajiban instansi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

a. Capaian Kinerja dan Perbandingan dengan Target Kinerja

Tahun 2023, capaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera telah berhasil melebihi target atau 104,3% dari 9 target indikator kinerja kegiatan atau dari 4 sasaran kegiatan. Berikut capaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023:

TABEL 3.1 Capaian Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023

No	Indikator Kerja	Target Perjanjian Kerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Kapasitas PPLH	5 Orang	5 Orang	100
2	Pengaduan & Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	180 Badan Usaha	132 Badan Usaha	73
3	Peningkatan Kapasitas PPNS	5 Orang	5 Orang	100
	Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	37 Perkara	41 Perkara	110
4	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	11 Operasi	12 Operasi	109
5	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	4 Operasi	12 Operasi	300
6	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	117 Orang	780
7	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1 Layanan	1 Layanan	100
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT)	2 Layanan	2 Layanan	100

Capaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023 yang paling tinggi yaitu Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan dari target 15 Orang terealisasi sebanyak 117 Orang (780%), selanjutnya Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal dari target 4 Operasi terealisasi 12 Operasi (300%), Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dari target 11 operasi terealisasi sebanyak 12 Operasi (109,7%), Kasus Tindak Pidanan LHK P21 dari target 37 Perkara terealisasi sebanyak 41 Perkara (109,76%), Peningkatan Kapasitas PPNS dan PPLH dari target 5 orang terealisasi 5 orang (100%). Kemudian layanan perkantoran 1 (100) dan 2 layanan dukungan manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT) (100%).

b. Capaian Kinerja dan perbandingan dengan Target Kinerja (Renstra Tahun 2020-2024)

No	Indikator Kerja	Target Renstra 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1.	Pengaduan & Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	319 Badan Usaha	132 Badan Usaha	41,4
2.	Peningkatan Kapasitas PPNS	8 Orang	5 Orang	62,5
3.	Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	93 Perkara	41 Perkara	44
4.	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	30 Operasi	12 Operasi	40
5.	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	54 Operasi	12 Operasi	22,2
6.	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	168 Orang	117 Orang	69,6
7.	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1	1 Layanan	100
8.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT)	1	2 Layanan	200

c. Capaian Kinerja dan Perbandingan dengan capaian Kinerja Tahun 2020 – 2023

No	Indikator Kerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1.	Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
	Laporan Keuangan Ditjen Gakkum LHK yang Tertib dan Akuntabel	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
2.	Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	120 orang	50 orang	117 Orang
	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Kerusakan Lingkungan Hidup	614.379,47 hektar	17 operasi	7 operasi	12 Operasi
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan, dan Satwa Liar	25 operasi	12 operasi	11 operasi	12 Operasi
3.	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	-	-	-	1 perkara
4.	Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	4 orang	5 orang	10 orang
	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	158 badan usaha	124 badan usaha	158 badan usaha	132 Badan usaha
5.	Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 orang	2 orang	4 orang	5 Orang
	Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P-21/Berkas Perkara yang Dinyatakan Lengkap	49 perkara	36 perkara	50 perkara	41 perkara

Kegiatan 1: Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Ditjen Gakkum LHK

Pada tahun 2023, kegiatan dukungan manajemen telah direalisasikan sebesar 98,99% atau dua layanan, meliputi penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (meliputi penyusunan Lakip, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan penyelenggaraan SPIP), penyelenggaraan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan administrasi keuangan, penyelenggaraan koordinasi atau konsultasi ke Pusat, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pemenuhan sarana dan prasarana serta pemeliharannya.

TABEL 3.2. Capaian IKK Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1a.	Layanan dukungan manajemen Eselon I	2 Layanan	2 Layanan	100
1b.	Layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Kegiatan 2: Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

Pada tahun 2023, kegiatan pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman keamanan kawasan hutan memenuhi 2 IKK yaitu: Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan dan Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal. Capaian IKK tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

TABEL 3.3 Capaian IKK Pencegahan dan Pengamanan Hutan

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2a.	Operasi pengamanan kawasan hutan	11 Operasi	12 Operasi	109
2b	Operasi peredaran hasil hutan illegal/TSL	4 Operasi	12 Operasi	300

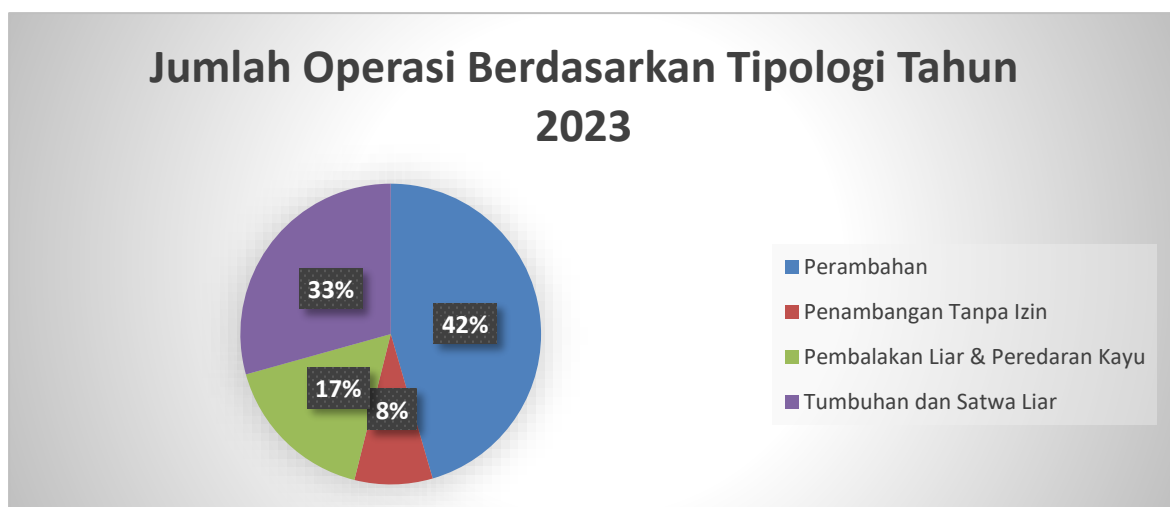
Sebanyak 24 kegiatan operasi telah dilaksanakan guna mencegah dan mengamankan gangguan dan ancaman keamanan kawasan hutan di wilayah Sumatera yang meliputi, operasi Pengamanan kawasan hutan sebanyak 12 atau 109%, Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal sebanyak 12 Operasi atau 300%. Jenis operasi pencegahan dan pengamanan hutan yang paling sering dilakukan operasi penangkapan kegiatan Illegal Logging dan perambahan hasil hutan kayu serta hasil hutan non kayu. Hasil operasi pencegahan dan pengamanan hutan masih menangkap para pelaku pekerja tingkat tapak, belum dapat menyentuh sumber pendana dari kegiatan tersebut. Undang- undang kehutanan belum optimal dapat menjerat sumber pelaku kejahatan kehutanan dan aktor-aktor dibalik kegiatan tersebut sering sekali merupakan aparat penegak hukum lainnya serta pejabat

daerah yang berwenang menjadi hambatan suatu operasi dapat berjalan sukses.

Dalam beberapa tahun belakang ini, operasi peredaran TSL menjadi sangat sering dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera. Barang TSL yang sering dilakukan penangkapan seperti penjualan kulit harimau, sisik tringgiling, dan paruh burung rangkok Jenis TSL yang dilakukan penangkapan merupakan jenis-jenis yang telah dilindungi atau langka.

TABEL 3.4 Jumlah Operasi di Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Tahun 2023

No.	Provinsi	Perambahan	Penambangan Tanpa Izin	Pembalakan Liar & Peredaran Kayu	Tumbuhan dan Satwa Liar	Total
1.	Aceh		1	1	1	3
2.	Sumut	1				1
3.	Riau	1		1	2	4
4.	Sumbar			1	2	3
5.	Kepri	2				2
6.	Jambi	2			2	4
7.	Sumsel	3	1			4
8.	Bengkulu			1		1
9.	Kep. Babel	1				1
10.	Lampung				1	1
Grand Total		10	2	4	8	24



GRAFIK 3.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Tipologi Tahun 2023

Sebaran lokasi kegiatan operasi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera lebih sering pada provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ketiga lokasi tersebut merupakan daerah rawan tindak pidana kehutanan dikarenakan provinsi tersebut masih memiliki cukup luas kawasan hutan. Aktivitas tindak pidana kehutanan pada ketiga provinsi tersebut semakin tinggi diakibatkan jumlah kebutuhan lahan yang semakin tinggi maka pengurangan luas kawasan hutan terus terjadi dan dialihfungsikan dengan perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat atau pelaku usaha lainnya.



GRAFIK 3.2. Sebaran Operasi di Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Tahun 2023

2a. Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan

Capaian IKK luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan, melalui kegiatan operasi yakni 10 operasi perambahan, 2 operasi penambangan tanpa izin, 8 operasi TSL dan 4 operasi pembalakan liar dan peredaran kayu. Kegiatan gangguan dan ancaman bidang kehutanan setiap tahunnya terus meningkat, seiring terus berkurangnya Kawasan hutan di Indonesia. Hasil pencegahan dan pengamanan hutan masih menangkap para pelaku pekerja tingkat tapak, belum dapat menyentuh sumber pendana dari kegiatan tersebut. Undang-undang kehutanan belum optimal dapat menjerat sumber pelaku kejahatan kehutanan dan aktor-aktor dibalik kegiatan tersebut sering sekali merupakan aparat penegak hukum lainnya serta pejabat daerah yang berwenang menjadi hambatan suatu operasi.

TABEL 3.5 Lokasi Operasi Pengamanan Hutan, Perusakan Lingkungan hidup & Peredaran Hasil Hutan.

Provinsi	Operasi Peredaran Tumbuhan & Satwa Liar	Operasi Ilegal Logging	Operasi Perambahan
	Hasil	Hasil	Hasil
Aceh	1 Ekor Orang Hutan dalam Keadaan hidup	Bahwa 1 (satu) unit alat berat sudah keluar dari lokasi Pembalakan liar menggunakan 1 (satu) unit alat berat di Desa Alue Meuraxa Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya Provinsi Aceh	Telah terjadi perusakan hutan berupa pertambangan emas ilegal menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi di dalam Kawasan Hutan Lindung di wilayah administrasi Desa Turue Cut Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
Sumut			1. Ditemukan lokasi penyadapan getah pinus; 2. Tidak ditemukan pelaku di TKP; 3. penyadapan berlangsung sejak November 2022 s/d saat ini; 4. Modus Operandi penguasaan lahan; a. Dusun Parmonangan, Desa Pondok Buluh Kecamatan Dolok Pangaribuan (masyarakat sekitar kawasan Hutan); b. Dusun Parhotingan, Desa Sihaporas Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (masyarakat luar kawasan).; c. Dusun Sihaporas Desa Sihaporas Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (Merupakan masyarakat luar
Riau	1. Kepemilikan Sisik Trenggiling dari Binzar 2. Tim operasi telah menangkap dan mengamankan barang bukti 2 (dua) lembar kulit harimau,	Tim Operasi menemukan 6 (empat) titik tumpukan kayu, 3 unit pondok ,2 unit sepeda dan 1 unit sampan alat angkut di dalam kawasan Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti	1. telah tertangkap tangan 2 (dua) kegiatan perambahan kawasan hutan dengan menggunakan alat berat excavator yakni lokasi pertama berada pada titik koordinat S.0°7'18" – E.101°43'28" dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi warna orange dengan 3 (tiga) orang pelaku dan lokasi kedua berada pada titik koordinat S.0°7'14" – E.101°43'53" dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek JCB warna kuning dan 2 (dua) orang pelaku
Sumbar	Tim tidak berhasil dalam operasi Tumbuhan dan Satwa Liar karena para pelaku merupakan pemain lama dan menguasai daerah tersebut, dan berdasarkan Analisa Tim Operasi bahwa Mediator maupun pelaku tidak memiliki Barang Bukti berupa Sisi Trenggiling , karena hanya berupa Foto yang dikirim melalui Whathshap (WA)		Dalam operasi pembalakan, seharusnya target merupakan Alat Berat , namun setelah dilakukan operasi tidak ditemukan adanya alat berat , tinggal bekas pembersihan kawasan HPK tersebut
Kepri		Telah dilakukan pemasangan Papan Larangan di 12 Areal Kegiatan Usaha yang berada di Kawasan Taman Buru Pulau Rempang	Ditemukan 2 (dua) gudang arang terbesar di Kecamatan Galang Kota Batam milik PT Anugerah Makmur Persada dan PT Fortindo Global Mandiri.
Jambi	1 Sisik Trenggiling 1 (satu) buah karung putih yang berisi Kulit Harimau Sumatera, tengkorak Harimau Sumatera dibungkus plastik putih dan 4 (empat) buah taring dibungkus plastik hitam; b. 1 (satu) buah karung putih yang berisi Tulang belulang Harimau Sumatera		1. Target kegiatan berupa pemusnahan tanaman kelapa sawit yang berada di dalam Kawasan TNBD di Wilayah Kerja Resort I.B Maro Sebo Ulu I Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi jambi. c. Bersama dengan petugas Balai Taman nasional Bukit Duabelas, Tim berhasil memusnahkan tanaman Kelapa sawit masyarakat yang masuk ke dalam kawasan Taman nasional Bukit Duabelas sebanyak 146 batang, dan juga memasang papan himbauan di dalam kawasan taman Nasional Bukit Duabelas, d. Kegiatan tersebut sebagai komitmen Balai taman nasional Bukit Duabelas bahwa tidak ada toleransi untuk Tanaman kelapa sawit di dalam Kawasan Taman nasional Bukit Duabelas, sehingga para

**LAPORAN KINERJA
BALAI GAKKUM LHK WILAYAH
SUMATERA
2023**

			<p>pelaku di harapkan jera dengan tindakan tersebut.</p> <p>2. Target kegiatan ini adalah para pelaku perambahan dalam kawasan hutan TNKS di Desa Sungai Kuning Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci yang pernah di beri peringatan dan himbauan sebelumnya oleh petugas dari TNKS (bulan mMei 2023) untuk segera meninggalkan lokasi paling lambat bulan Oktober 2023</p>
Sumsel			<p>1. Agar dilakukan kegiatan operasi lanjutan untuk memaksimalkan kegiatan tindakan pidana kehutanan berupa pengrusakan yaitu illegal drilling yang terjadi di dalam areal konsesi PT. BPP yang merupakan kawasan lindung.</p> <p>2. Agar dilakukan kegiatan operasi lanjutan untuk memaksimalkan kegiatan tindakan pidana kehutanan berupa pengrusakan yaitu illegal drilling yang terjadi di dalam areal konsesi PT. BPP yang merupakan kawasan lindung.</p> <p>3. Tim mengamankan kedua orang pelaku yang mengaku bernama M. Aris dan Umar yang diduga mengangkut kayu tanpa dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah kayu jenis medang panjang 4m, lebar 25 cm dan tebal 12 cm - 7 buah kayu jenis medang panjang 4 m, lebar 25 cm dan tebal 15 cm - 1 buah penggaris besi ukuran 30 cm - 1 buah buku catatan kayu <p>4. alat berat Merk Hitachi PC 210</p>
Bengkulu		<p>Mengamankan barang bukti yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah kayu jenis medang panjang 4m, lebar 25 cm dan tebal 12 cm - 7 buah kayu jenis medang panjang 4 m, lebar 25 cm dan tebal 15 cm - 1 buah penggaris besi ukuran 30 cm - 1 buah buku catatan kayu 	
Kep. Babel			<p>Tim berhasil mengamankan barang bukti temuan antara lain 1 (satu) unit Alat Berat Merek LiuGong Hydraulic Excavator Model CLG908E warna Kuning dengan Product Identification Number LGC908EZCNC301836 dan alat-alat perkebunan dari dalam Kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar.</p>
Lampung	<p>77 buah keranjang buah warna putih dan 10 buah kardus cokelat Tehrio yang berisi satwa berbagai jenis burung berjumlah 2.032 ekor</p>		

2b. Jumlah operasi peredaran hasil hutan illegal.

Capaian IKK dari **jumlah operasi peredaran hasil hutan illegal** adalah sebanyak 12 operasi atau 300% dari target 4 operasi yang terdiri dari 8 operasi peredaran TSL dan 4 operasi pembalakan serta peredaran kayu ilegal.

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Pencegahan dan Pengamanan Hutan			
1	Kejahatan TSL		Konferensi pers pada Jumat, 7 Juni 2023 terkait penangkapan 3 orang tersangka penjual kulit harimau Sumatera di Teluk Meranti, Bunut, Pelalawan, Riau. Barang bukti yaitu dua (2) lembar kulit harimau Sumatera dan empat (4) buah taring satwa di lindungi
2	Penyegelan Gudang Arang Berbahan Bakau (Mangrove) Illegal	 <p style="text-align: right; font-size: small;">0°54'37,378"N 104°9'18,756"E Jalan Trans Bareleng Galang, Kota Batam 29482 Altitude: 17.0m Speed: 0.0km/h 01/27/2023 15:39:20.6</p>	Bersama dengan Dirjen Gakkum LHK, Direktur PPH, dan Komisi IV DPR ditemukan 2 (dua) gudang arang terbesar di Kecamatan Galang Kota Batam dan dari 11 (sebelas) titik lokasi zang diberikan Komisi IV DPR untuk diperiksa, didapatkan aktivitas lainza berupa dapur arang dan pabrik batu bata yang diduga illegal dan telah dipasang garis larangan di lokasi.
3	Perambahan	 <p style="text-align: left; font-size: x-small;">19 May 2023 03:17:25 2.7934° S, 106.4872° E Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Toboali</p>	Tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti temuan antara lain 1 (satu) Unit Alat Berat dan alat-alat perkebunan dari dalam Kawasan Huta Produksi Lubuk Besar, Desa Jeriji, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan 3: Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Pada tahun 2023, capaian IKK Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi adalah telah tertanganinya 132 badan usaha atau 73,3% dari target 180 badan usaha terdiri dari 82 pengaduan telah selesai, 50 pengawasan badan usaha dan kegiatan pengambilan data informasi potensi pengaduan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan.

TABEL 3.6 Capaian IKK Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

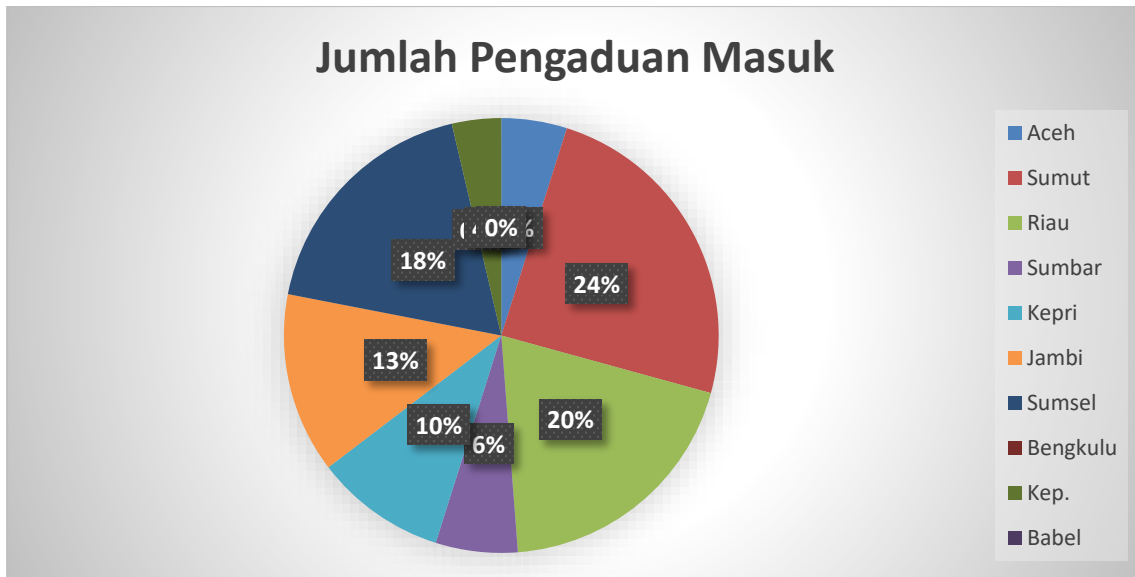
	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK.	180 Badan Usaha	132 Badan Usaha	73,3

Penanganan Pengaduan

Capaian IKK Penanganan Pengaduan, Balai Gakkum LHK telah menangani 82 pengaduan Badan usaha dan Non Badan usaha 117 yang masuk dengan rincian pengaduan badan usaha dan Non Badan Usaha yang telah selesai dilakukan verifikasi pada tahun 2023.

TABEL 3.7 Jumlah Pengaduan di Wilayah Kerja Balai Gakkum LHK Sumatera Tahun 2023

No.	Seksi Wilayah	Provinsi	Jumlah Pengaduan Masuk	Status		Jumlah Pengaduan Non Perusahaan yang masuk dan selesai
				Proses	Selesai	
1	SW-1	Aceh	4		4	12
2	SW-1	Sumut	20		20	52
3	SW-2	Riau	16		16	10
4	SW-2	Sumbar	5		5	6
5	SW-2	Kepri	8		8	5
6	SW-2	Jambi	11		11	13
7	SW-3	Sumsel	15		15	6
8	SW-3	Bengkulu	0		0	2
9	SW-3	Kep. Babel	3		3	11
10	SW-3	Lampung	0		0	0
Total			82		82	117



GRAFIK 3.3 Jumlah Pengaduan Tahun 2023

Berdasarkan sebaran penanganan pengaduan yang terbanyak berada pada provinsi Sumatera Utara dan Riau. Kemudian, jumlah penanganan pengaduan yang paling sedikit berada pada provinsi Kepulauan Babel dan Aceh. Kedua provinsi tersebut sangat sedikit dilakukan penanganan pengaduan dikarenakan aksesibilitas keduanya sulit dan mahal. Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera mencatat 199 pengaduan yang telah masuk secara langsung atau melalui surat, SMS, email, Telepon, website aplikasi pengaduan, WhatsApp dan media sosial serta melampirkan bukti atau data pendukung sesuai dengan formulir pengaduan. Diantaranya Pengaduan Perusahaan 82 dan 117 pengaduan Non Perusahaan.

Ada beberapa hal yang menghambat proses penyelesaian pengaduan pada Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera yaitu: *pertama*, pengaduan yang bersifat dinamis yang tidak mengenal waktu administrasi menjadi kendala utama penyelesaian pengaduan, kebutuhan anggaran penanganan pengaduan belum mencukupi untuk menindaklanjuti aduan yang disampaikan ke Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera. *Kedua*, kebutuhan SDM yang berkompetensi dalam penanganan pengaduan secara administrasi dan teknis lapangan dianggap sangat kurang untuk mengakomodir jumlah pengaduan yang terus meningkat. *Ketiga*, kebutuhan alat dukungan teknis lapangan masih sangat kurang memadai untuk melakukan uji portabel setiap parameter kunci. *Keempat*, proses koordinasi yang sulit antara masyarakat dan PEMDA membuat kepentingan berbagai pihak. *Kelima*, kualitas pengaduan yang masuk terkadang diluar tipologi kehutanan dan lingkungan hidup sehingga diperlukan penyaringan yang lebih teliti terhadap pengaduan yang telah masuk.

TABEL 3.8 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sektor Tahun 2023

No.	Seksi Wilayah	Provinsi	Jumlah Pengaduan Masuk	Status		Jumlah Pengaduan Non Perusahaan yang masuk dan selesai	Tipologi/Sektor	
				Proses	Selesai		LH	Kehutanan
1	SW-1	Aceh	4		4	12	3	9
2	SW-1	Sumut	20		20	52	15	37
3	SW-2	Riau	16		16	10	11	12
4	SW-2	Sumbar	5		5	6	1	8
5	SW-2	Kepri	8		8	5	8	3
6	SW-2	Jambi	11		11	13	3	18
7	SW-3	Sumsel	15		15	6	12	6
8	SW-3	Bengkulu	0		0	2		2
9	SW-3	Kep.Babel	3		3	11	4	6
10	SW-3	Lampung	0		0	0	3	0
Total			82		82	117	58	101

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat, SMS, email, Telepon, website aplikasi pengaduan, WhatsApp dan media sosial serta melampirkan bukti atau data pendukung sesuai dengan formulir pengaduan.

Berdasarkan sumber pengaduan, 199 pengaduan dengan rincian 82 Pengaduan Perusahaan telah selesai dilakukan verifikasi lapangan ditambah 117 Pengaduan Non Perusahaan. Pengaduan yang diterima secara langsung sebanyak 21 (25,6%), surat sebanyak 42 (52,5%), telepon sebanyak 1 (1,2%), email sebanyak 0 (0%), media sosial sebanyak 3 (3,75%), website pengaduan sebanyak 15 (18,3%) dan lain-lain seperti serta aplikasi lapor dan lain- lainnya sebanyak 0 (0%)

TABEL 3.9 Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2023

No.	Seksi Wilayah	Provinsi	Jumlah Pengaduan Masuk	Status		Jumlah Pengaduan Non Perusahaan	Tipologi/Sektor				Sumber Pengaduan								
				Proses	Selesai		LH	Kehutanan	LHK	Non LHK	Langsung	Surat	SMS	Email	Telp	Medsos	WEBSITE	APLIKASI LAPOR	Lain-lain
1	SW-1	Aceh	4		4	12	3	9	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
2	SW-1	Sumut	20		20	52	15	37	0	0	3	15	0	0	0	0	1	0	0
3	SW-2	Riau	16		16	10	11	12	0	0	2	13	0	0	0	1	4	0	0
4	SW-2	Sumbar	5		5	6	1	8	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0
5	SW-2	Kepri	8		8	5	8	3	0	0	0	8	0	0	1	0	1	0	0
6	SW-2	Jambi	11		11	13	3	18	0	0	8	4	0	0	0	1	0	0	0
7	SW-3	Sumsel	15		15	6	12	6	0	0	3	6	0	0	0	0	8	0	0
8	SW-3	Bengkulu	0		0	2		2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9	SW-3	Kep. Babel	3		3	11	4	6	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0
10	SW-3	Lampung	0		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			82		82	117	58	101	0	0	21	42	0	0	1	3	15	0	0



GRAFIK 3.4 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2023

Pengaduan yang diterima dapat ditindaklanjuti dengan verifikasi dokumen perizinan, verifikasi lapangan (pengawasan), pengumpulan data dan informasi (puldasi), pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), atau pelimpahan ke Instansi atau Unit terkait. Sehingga data atau berkas pengaduan dapat dikatakan sebagai pintu masuk kegiatan penegakan hukum kasus lingkungan hidup dan kehutanan atau pun non KLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 22 tahun 2017).

Meskipun KLHK dalam hal ini Direktorat PPSA telah membangun website aplikasi pengaduan <https://pengaduan.menlhk.go.id> namun jumlah pengaduan melalui surat masih jauh lebih besar 52% dibandingkan dengan melalui website 18%. Hal ini kemungkinan karena banyaknya bukti atau data-data pendukung yang membutuhkan waktu atau kemudahan akses dalam proses *upload* dan adanya keterbatasan alat pemindai (*scanner*) bagi Pengadu dalam melampirkan bukti. Pilihan ke-3 terbesar adalah melalui Secara langsung dan media sosial.

Kasus pengaduan berdasarkan Provinsi dimulai dari jumlah terbanyak yakni Sumatera Utara 20 (24,4%), Riau 16 (19,5%), Sumatera Selatan 15 (18,3%), Jambi 11 (13,4%), Sumatera Barat 5 (6%), Aceh 4 (4,87%) dan Kep.Babel (3,65%)

Pelaksanaan Pengawasan Izin Terhadap Penanggung Jawab Usaha

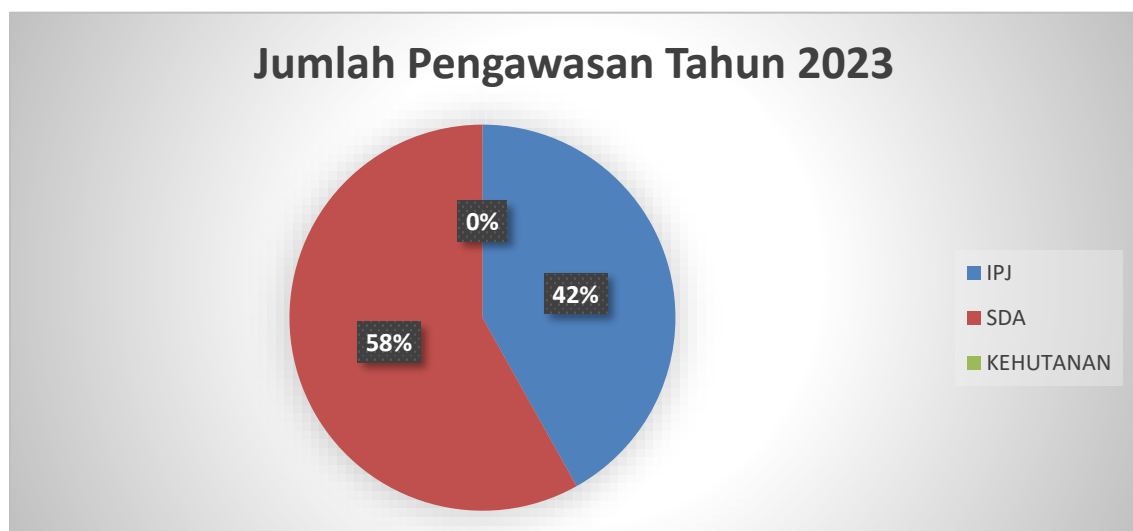
Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 50 Badan Usaha (45,4%) dari target 110 Badan usaha yang diamanatkan kepada Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera. Bidang perusahaan tersebut yakni 21 di bidang Industri Prasarana Jasa (IPJ) atau (19%), 29 di bidang Sumber Daya Alam (SDA) atau (26,36%) dan 0 di bidang kehutanan atau (0%), dengan rekomendasi: 11 taat, dan 40 tidak taat.

TABEL 3.10.a Jumlah Pengawasan berdasarkan Sektor Industri/Jenis Usaha (Pengawasan Reguler)

No.	Sektor	TAAT	TIDAK TAAT							Tidak Beroperasi	JUMLAH
			Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Denda Administratif	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Pulbaket	Pidana		
1	SDA	4									4
2	IPJ	7									7
	SUB TOTAL	11	1	7	0	0	0	0	0	0	11
	TOTAL	11								0	11

TABEL 3.10.b Jumlah Pengawasan berdasarkan Sektor Industri/Jenis Usaha (Sanksi Administrasi)

No.	Sektor	TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL
1	SDA		25	25
2	IPJ		14	14
	TOTAL		39	39



GRAFIK 3.5 Jumlah Pengawasan Tahun 2023

Kegiatan pengawasan lebih sering dilakukan pada bidang Sumberdaya Alam dan Industri Prasarana Jasa. Jumlah pejabat fungsional pengawas yang masih terbatas dan alokasi kebutuhan anggaran yang masih kurang menjadi permasalahan yang menghambat kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera masih belum optimal.

TABEL 3.11 Hasil Pengawasan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023

No.	Provinsi	TAAT	TIDAK TAAT						Tidak Beroperasi	JUMLAH
			Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Denda Administratif	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin	Pulbaket		
1	Aceh									0
2	Sumatera Utara	3	1	1						5
3	Riau									0
4	Kepulauan Riau			2						2
5	Jambi									0
6	Sumatera Barat									0
7	Sumatera Selatan									0
8	Kep. Bangka Belitung									0
9	Bengkulu			2						2
10	Lampung			2						2
	SUB TOTAL	3	1	7	0	0	0	0	0	11
	TOTAL	3			8				0	11

GRAFIK 3.7 Hasil Pengawasan Berdasarkan Provinsi Tahun 2023 (Sanksi Administrasi)

No.	Provinsi	TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL
1	Aceh		3	3
2	Sumatera Utara		6	6
3	Riau		6	6
4	Kepulauan Riau		2	2
5	Jambi		5	5
6	Sumatera Barat		1	1
7	Sumatera Selatan		10	10
8	Kep. Bangka Belitung		3	3
9	Bengkulu			0
10	Lampung		3	3
	TOTAL		39	39

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023 terdapat 2 (dua) kegiatan pengawasan yaitu pengawasan regular dan pengawasan terhadap sanksi administrasi. Pengawasan regular dilakukan pada 4 provinsi yaitu provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Lampung. Pengawasan hasil sanksi administrasi pada provinsi Sumatera Utara dan Riau.

Berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023, Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera mencatat bahwa diperlukan peningkatan kompetensi PPLH untuk mendukung dinamika kebijakan dan teknis pengawasan yang terus menerus meningkat, PPLH sering terkena dalam pengujian suatu parameter lingkungan hidup karena mereka belum dilengkapi dengan multiparameter yang digunakan untuk menguji pada saat pengawasan, dan dukungan anggaran yang masih kurang untuk mengoptimalkan kinerja PPLH di lapangan.

Peraturan dan kebijakan yang terlalu cepat berubah dan bertambah menyebabkan pelaku usaha belum mengetahui setiap perubahan peraturan yang berlaku sehingga sering kali perusahaan menjadi tidak taat. Perusahaan juga masih banyak yang belum berkomitmen terhadap rekomendasi pengawasan dikarenakan beban biaya yang sangat mahal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Penanganan pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi			
1	Penanganan pengaduan		Verifikasi lapangan terhadap dugaan adanya Pencemaran Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kegiatan Pertambangan PT Alam Semesta Sukses Batu Bara kedalam lahan warga di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
2	Pengawasan terhadap izin penanggung jawab usaha		Pengawas lingkungan hidup melakukan Penyegeelan dan Pemasangan PPLH Line lahan terbakar di areal HGU PT PN VII Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan 4: Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penanganan kasus tindak pidana berawal dari kegiatan operasi yang merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat, rekomendasi dari kegiatan pengawasan, dan pelimpahan dari Intansi atau unit terkait. Kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan meliputi kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), penanganan barang bukti, proses penyidikan, fasilitasi penanganan tindak pidana, peningkatan kapasitas, gelar perkara dan koordinasi. Tahun 2023, ada 2 IKK Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera yakni:

TABEL 3.12 Capaian IKK Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4a	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21.	37 Kasus	41 Kasus	110,8
4b	Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan.	5 Orang	5 Orang	100

4a. Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21.

Capaian IKK Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 yakni sebanyak 41 kasus atau 110,8% dari target 37 kasus, yang terdiri dari 12 kasus TSL (32,4%), 18 kasus *illegal logging* (48,6%), dan 11 kasus perambahan (29,7%).

TABEL 3.13 Jumlah P-21 Berdasarkan Tipologi Kasus Tahun 2023

No.	Seksi Wilayah	Provinsi	TSL	Illog	Perambahan (kebun/tambang)	Karhutla	Pencemaran LH	Sampah, Limbah, dan B3	Perusakan Lingkungan	Total
1	SW-1	Aceh	2	2						4
2	SW-1	Sumut	1	5	1					7
3	SW-2	Riau	2	7	5					14
4	SW-2	Sumbar		1	1					2
5	SW-2	Kepri								0
6	SW-2	Jambi	4	3						7
7	SW-3	Sumsel	1		1					2
8	SW-3	Bengkulu								0
9	SW-3	Kep. Babel			2					2
10	SW-3	Lampung	2		1					3
Total			12	18	11	0	0	0	0	41

Wilayah kerja Balai Gakkum LHK mencakup 10 provinsi, jumlah P-21 terbanyak di provinsi Riau 14 Kasus, Sumatera Utara dan Jambi masing-masing yaitu 7 kasus, kemudian Aceh 4 kasus, Lampung 3 Kasus, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kep Babel masing-masing 2 kasus. Penanganan kasus yang sering terjadi pada kegiatan perambahan perkebunan dan kegiatan *illegal logging* hasil hutan kayu serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai P21 sering kali mengalami hambatan seperti pemenuhan barang bukti dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran sungai sangat sulit. Sifat barang bukti yang dinamis dilapangan menjadi faktor utama parapenyidik menyelesaikan kasus tersebut sampai P21. Ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten pada kasus tertentu sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan kasuspidana karena berdasarkan KUHAP pasal 184 menyatakan keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti untuk menguatkan suatu tindak pidana.

4b. Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan

Berdasarkan Renstra 2020 – 2024, selama 5 tahun peningkatan kapasitas PPNS akan dilaksanakan kepada 30 PPNS dari 47 PPNS Balai Gakkum LHK. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas kepada 5 orang PPNS atau 100% dari target 5 PPNS. Kebutuhan PPNS masih sangat kurang melihat dari pertambahan jumlah kasus yang ditangani oleh Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera.

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Penegakan Hukum Pidana LHK			
			<p>Berkas perkara kepemilikan satwa yang dilindungi (Orang Hutan) dengan tersangka NA (30) dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dan siap untuk disidangkan. Tersangka terancam pidana penjara 5 Tahun dan Denda Rp.100.000.000</p>

B. REALISASI ANGGARAN

Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera pada tahun 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 60.491.084.000 atau 99,30% dari target sebesar Rp 59.888.069.350. Realisasi anggaran terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 26.449.773.885 atau 98,77%; Belanja Barang sebesar Rp 29.306.099.401 atau 99,69%, dan Belanja Modal sebesar Rp 4.311.619.834 atau 99,86%.

TABEL 3.15 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			5.137.120.000	5.131.359.560	99,88
	Meningkatnya pelaku usaha dan atau kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas PPLH	10 Orang	100.000.000	99.625.700	99,62
		Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	180 Badan Usaha	5.037.120.000	5.031.733.860	99,89
2.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			9.835.700.000	9.770.075.938	99,33
	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Peningkatan kapasitas PPNS	5 Orang	20.000.000	18.967.736	94,83
		Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	37 Perkara	8.815.700.000	8.770.462.967	99,48
		Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	1 Perkara	1.000.000.000	980.645.235	98,06%
3.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			7.289.964.000	7.286.903.526	99,95
	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	11 Operasi	5.044.964.000	5.042.386.427	99,94
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	4 Operasi	2.045.000.000	2.044.517.099	99,97
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	200.000.000	199.679.216	99,83
4.	Dukungan Manajemen Satker			38.228.300.000	37.879.474.871	99,08
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Balai PHHLHK	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1 Layanan	4.217.600.000	4.211.816.334	99,86
		Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT)	2 Layanan	34.010.700.000	33.667.658.537	98,99



GRAFIK 3.9 Capaian (%) Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera 2023 merupakan laporan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tahun 2023, Balai Gakkum LHK telah berhasil merealisasikan yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan 99,95% dengan kegiatan operasi sebesar 12 operasi atau 109%, Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebesar 132 perusahaan atau 73,3%, dan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 41 kasus atau 109,7%.

Meskipun target tersebut telah tercapai bahkan melebihi target, pelaksanaannya tidak terlepas dari masalah. Masalah tersebut tentunya menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja Balai Gakkum LHK dalam penegakan hukum. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), pertumbuhan dunia usaha yang semakin terbuka, perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya di bidang industri, tentunya akan berdampak kepada tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan penanganannya. Untuk itu perlu sejumlah langkah untuk mengatasi dampak yang timbul yang sekaligus juga meningkatkan kinerja Balai Gakkum LHK ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan dukungan manajemen (meliputi alokasi pagu anggaran setiap kegiatan, penyusunan Lakip, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan penyelenggaraan SPIP);
2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM, baik itu terkait peraturan per undang-undangan maupun teknologi mengingat pertambahan beban kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya;
3. Meningkatkan kapasitas alat pendukung teknis dalam setiap kegiatan penegakan hukum agar dapat terlaksana dengan baik;
4. Mengembangkan metode atau teknologi kegiatan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik khususnya kegiatan penanganan pengaduan dan operasi pengamanan

hutan dan hasil hutan, mengingat wilayah kerja Balai Gakkum LHK cukup luas meliputi 10 provinsi yang didalamnya terdapat 120 Kabupaten dan 34 Kota;

5. Membangun sistem manajemen kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak dalam penanganan kasus dengan instansi lainnya yang mendukung, pemerintah daerah sampai dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan.
6. Membangun sistem informasi yang terintegrasi antara kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan izin, operasi pengamanan dan penegakan hukum pidana, guna mempercepat pengambilan keputusan, seperti ketersediaan riwayat dari penaatan Perusahaan dan dokumen perizinannya;
7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan baik itu capaian anggaran maupun indikator kegiatan serta sarana prasarana pendukung.